

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dalam bentuk negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, serta letaknya yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra yang dilalui garis khatulistiwa (ekuator). Selain itu, Indonesia memiliki sumberdaya laut dan pesisir yang melimpah di seluruh wilayah sekitar garis pantai Indonesia, baik hayati maupun nonhayati.

Wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai macam tipologi habitat serta keanekaragaman biota yang tinggi. Keanekaragaman hayati tersebut merupakan sumber kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan atau perdagangan, sehingga keberadaannya sangat rawan terhadap kepunahan akibat aktivitas kehidupan dan pembangunan. Beberapa bentuk ancaman kelestarian keanekaragaman hayati antara lain karena pencemaran, eksploitasi sumber daya alam untuk perdagangan, penebangan hutan dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk ekosistem pesisir Indonesia adalah ekosistem hutan mangrove.

Hutan mangrove adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen, 2000). Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang unik dan termasuk sumberdaya alam yang sangat potensial serta mendukung hidupnya keanekaragaman flora dan fauna. Komunitas terestris akuatik yang ada di dalam ekosistem hutan mangrove secara langsung atau tidak langsung berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan (ekologi). Tetapi ekosistem ini sangat mudah dipengaruhi oleh ekosistem yang ada di sekitarnya serta sulit untuk dipulihkan kembali jika terjadi degradasi. Berdasarkan luasnya kawasan, hutan mangrove di Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di dunia. Namun demikian, kondisi mangrove Indonesia baik secara kualitatif dan kuantitatif terus menurun dari tahun ke tahun. Luas ekosistem hutan mangrove yang ada di Indonesia sekitar 4.251.011 Ha yang tersebar di beberapa pulau, seperti Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua/Irian yang dimana persebaran ekosistem hutan mangrove terbesar terdapat di Papua/Irian ($\pm 65\%$) dan Sumatera ($\pm 15\%$) (WCMC "World Conservation Monitoring Centre", 1992). Tetapi, lebih dari setengah luas ekosistem hutan mangrove yang ada di Indonesia ternyata dalam kondisi rusak parah, diantaranya 1,6 juta Ha dalam kawasan hutan dan 3,7 juta Ha di luar kawasan hutan (Ginting, 2006).

Kerusakan ekosistem hutan mangrove Sumatera Utara yang paling tinggi berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara, yaitu Kota Tanjung Balai (Kabupaten Asahan) yang mencapai 12.900Ha (89,6%) dari 14.400 Ha.

Kemudian Kecamatan Medan Belawan (Kota Medan) sebesar 150 Ha (71,8%) dari 250 Ha, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai 12.400Ha (62%) dari 20.000 Ha, dan Kabupaten Langkat 25.300 Ha(60%) dari 35.300 Ha. Tetapi kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Labuhan Batu hanya 500 Ha (29,4%) dari 1.700 Ha. Sedangkan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, kerusakan ekosistem hutan mangrove masih sangat kecil. Seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya 250 Ha (13,9%) dari 1.800 Ha, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 200 Ha (6,9%) dari 2.900 Ha, dan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan hanya 650 Ha (9,1%) dari 7.200 Ha (Ginting 2006)

Kerusakan ekosistem hutan mangrove adalah perubahan fisik biotik maupun abiotik di dalam ekosistem hutan mangrove menjadi tidak utuh lagi atau rusak yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia (Tirtakusumah, 1994). Pada umumnya kerusakan ekosistem hutan mangrove disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pendayagunaan sumberdaya alam wilayah pantai tidak memperhatikan kelestarian, seperti; penebangan untuk keperluan kayu bakar yang berlebihan, tambak, permukiman, industri dan pertambangan (Permenhut, 2004). Aktivitas ekonomi penduduk yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan mangrove yaitu pengalihfungsian kawasan ekosistem hutan mangrove menjadi lahan pertambakan, pertanian, perumahan, permukiman, dan reklamasi pantai untuk kawasan rekreasi atau pariwisata. Hutan mangrove memiliki bermacam-macam fungsi, antara lain fungsi fisik, biologis dan sosial ekonomis. Fungsi biologis yang dimiliki hutan mangrove antara lain sebagai daerah asuhan (*nursery grund*), daerah mencari makan (*feeding ground*) dan daerah pemijahan (*spawning*

ground) dari berbagai biota laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota, sumber plasma nutfah (Rahmawaty, 2006). Keberadaan ekosistem mangrove yang dekat dengan manusia secara langsung maupun tidak, akan menjadi sasaran dari beragam aktivitas manusia. Tak jarang beragam aktivitas dari manusia ini menjadi sumber dari perubahan fungsi hutan mangrove.

Perubahan fungsi hutan mangrove ini disatu sisi akan memberikan keuntungan kepada pihak pengembang usaha, namun disisi lain dapat memunculkan tekanan ekologi berupa pembuangan limbah dan pencemaran dari berbagai aktivitas manusia. Pemanfaatan hutan mangrove yang ditempuh tanpa melalui mekanisme atau penelitian terlebih dahulu dapat memunculkan berbagai konflik dan permasalahan. Konflik pemanfaatan hutan mangrove selalu menjadi bayang-bayang akan timbulnya degradasi baik fisik dan kualitasnya. Hal ini telah mendapatkan perhatian yang serius bagi banyak kalangan pemerhati lingkungan (Permenhut dalam Riandani, (2007)).

Pengembangan tambak-tambak oleh penduduk diatas kawasan hutan mangrove beberapa tahun belakangan dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang merusak karena pengembangannya didahului dengan penebangan mangrove sehingga ekosistem yang telah terbentuk sebelumnya mengalami gangguan. Aktivitas penduduk dikawasan hutan mangrove bukan hanya pembukaan lahan untuk tambak, melainkan meliputi berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduk (Buletin PSL Universitas Surabaya, 25 (2011): 3-6).

Aktivitas penduduk merupakan suatu wujud kegiatan atau tindakan yang memiliki pola tertentu dari manusia di dalam penduduk yang dapat

menimbulkan wujud kebudayaan. Aktivitas penduduk terdiri dari berbagai macam bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk aktivitas ekonomi penduduk terdiri dari pangan dan sandang, tempat tinggal/perumahan, pendapatan/penghasilan dan pekerjaan/mata pencaharian (Melly, 1989).

Berbagai aktivitas ekonomi penduduk salah satunya pengelolaan tambak memang menjanjikan hasil yang menggiurkan tetapi kelestarian ekosistem hutan mangrove sangat perlu diperhatikan kesinambungan dan kelestariannya. Kondisi ini memerlukan suatu strategi yang jelas dan nyata untuk dapat mempertahankan dan mengelola secara baik dan utuh hutan mangrove agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan serta mengalami kerusakan. Sekarang ini telah ditemukan puluhan hektar hutan mangrove khususnya di wilayah Seruwe, Lingkungan I, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan yang sudah berubah fungsi menjadi areal pemukiman penduduk dan aktivitas perekonomian diantaranya kegiatan perikanan (tambak dan budidaya) dan pengembangan lahan industri. Luas areal tambak didaerah ini mengalami pertambahan dimana pada tahun 2004, luasnya 30,21 Ha, sedang pada tahun 2012 luas tambak adalah 36,73 Ha. Meluasnya areal tambak ini mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove seluas 6,52 Ha dari luas keseluruhan (Kantor Kelurahan Sei Mati 2013) Dengan ini perlu dilakukan pengkajian pada aktivitas ekonomi penduduk dan kerusakan ekosistem hutan mangrove di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang terkait dengan aktivitas penduduk dan kerusakan ekosistem hutan mangrove di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, antara lain meliputi:

1. Kerusakan ekosistem hutan mangrove
2. Aktivitas ekonomi penduduk dalam ekosistem hutan mangrove
3. Dampak aktivitas ekonomi penduduk terhadap lingkungan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kerusakan ekosistem hutan mangrove, aktivitas ekonomi penduduk di lingkungan hutan mangrove, upaya pemerintah dan penduduk melestarikan ekosistem hutan mangrove di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas ekonomi penduduk dalam ekosistem hutan mangrove terhadap lingkungan di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan
2. Bagaimana kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat aktivitas ekonomi penduduk di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan
3. Bagaimana Upaya pemerintah dan penduduk dalam melestarikan ekosistem hutan mangrove di kelurahan Sei Mati Medan Labuhan

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas ekonomi penduduk dalam ekosistem hutan mangrove di lingkungan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.
2. Untuk mengetahui keadaan fisik ekosistem hutan mangrove di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.
3. Upaya pelestarian kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat aktivitas ekosistem hutan mangrove.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah dan swasta di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan khususnya di Kelurahan Sei Mati dalam mengambil kebijakan tentang pelestarian kerusakan ekosistem hutan mangrove.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi penduduk yang berdomisili di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah berbentuk skripsi.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis lain untuk meneliti masalah yang sama pada waktu dan daerah yang berbeda.